



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ATTHOBARI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 676848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.445.500.000**

1. Tanah Seluas 446 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 446.000.000
2. Tanah Seluas 734 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000
3. Tanah Seluas 403 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 201.500.000
4. Bangunan Seluas 189 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000
5. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 344.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. LAINNYA, GENIO SEPEDA BALAP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI

Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 56.750.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 536.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.382.750.000

III. HUTANG

Rp. 285.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.097.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.